

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Dewi dan Nugrahanti (2014) melakukan penelitian dengan teknik *purposive sampling* sebanyak 36 perusahaan barang konsumen yang digunakan sebagai sampel. Menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan pemantauan yang efektif terhadap manajemen yang dilakukan oleh dewan komisaris independen akan dapat membantu meminimalkan *agency conflict* yang akhirnya akan berdampak pada nilai perusahaan.

Penelitian Fidiana & Sulistyowati (2017) bertujuan untuk menganalisis pengaruh good corporate governance yang terdiri atas dewan direksi, dewan komisaris, komisaris independen, dan komite audit terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan di Indonesia pada tahun 2012-2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan direksi dan dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Penelitian Melia & Yulius (2015) bertujuan untuk menguji pengaruh antara good corporate governance yang diproksikan dengan dewan komisaris, komisaris independen, dan kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan. Dewan komisaris, komisaris independen, dan kepemilikan manajerial digunakan sebagai variabel independen. Kinerja perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan ROA sebagai ukuran dan sebagai variabel dependen. Penelitian ini juga menggunakan variabel control yaitu ukuran perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan 19 komisaris, komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap ROA. Secara parsial, dewan komisaris dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap ROA. Sedangkan, komisaris independen dan ukuran perusahaan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap ROA.

Penelitian oleh Zabrie (2015) melakukan penelitian tentang *Corporate Governance Practices and Firm Performance: Evidence from Top 100 Public Listed Companies in Malaysia* menggunakan variabel *Corporate Governance* yang di proksikan dengan ukuran kepemilikan manajerial dan Kinerja Perusahaan yang di proksikan dengan ROA dan ROE. Hasil menunjukkan bahwa rata-rata jumlah direksi dan rasio rata-rata komisaris independen antara Top 100 perusahaan publik yang terdaftar Malaysia 2008-2012 adalah 9 orang dan 46% masing-masing, serta adanya hubungan campuran antara *corporate governance* dan kinerja perusahaan.

Yuni & Nur (2015) meneliti tentang pengaruh *corporate governance* yang diproksi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, dan komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan *corporate social responsibility* sebagai variabel intervening. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* yang diproksi kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan kepemilikan manajerial dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Caesari (2013) melakukan penelitian tentang Analisis Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan dan Harga Saham Perusahaan yang Masuk ke Dalam Pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index*, menunjukkan bahwa penerapan GCG tidak memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan rasio Tobin's Q pada perusahaan sampel penelitian. Penerapan GCG hanya memberikan pengaruh sebesar 8% terhadap kinerja keuangan sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Sedangkan terhadap harga saham, penerapan GCG memberikan pengaruh positif yang signifikan yaitu dengan memberikan pengaruh sebesar 16.2% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penelitian ini menggabungkan antara aspek tata kelola perusahaan atau *corporate governance* dengan keputusan pendanaan dan keputusan investasi yang termasuk kedalam aspek keputusan keuangan. Sehingga, dapat diketahui bagaimana sistem tata

kelola perusahaan manajer dalam mempertimbangkan keputusan keuangan dalam satu penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2018) menjelaskan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Semakin banyak jumlah direksi maka semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR. Hasil ini menunjukkan pentingnya jumlah dewan direksi yang mencukupi, sehingga mereka mampu memberikan tambahan masukan pelaksanaan CSR. Dengan adanya dewan direksi akan menentukan apakah perusahaan akan melaporkan pengungkapan lingkungannya secara banyak maupun sedikit. Sehingga perusahaan tersebut akan melaporkan pengungkapan lingkungannya. Semakin banyak dewan direksi didalam perusahaan, maka semakin luas pengungkapan lingkungan yang dilakukan karena dewan direksi akan membuat keputusan kepada manajemen untuk melakukan pengungkapan lingkungan yang luas.

Menurut penelitian Hermiyetti dan Katlanis (2016) dengan sampel 125 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2009-2012. Hasil penelitian menunjukkan variabel kepemilikan manajerial, dan komite audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Agensi

Teori keagenan pada dasarnya mengatur hubungan antara satu kelompok pemberi kerja (*Prinsipal*) dengan penerima tugas (*agen*) untuk melaksanakan pekerjaan. Hal ini yang dimaksud dengan pemberi kerja adalah para pemegang saham, sedangkan penerima tugas adalah manajemen. Kedua belah pihak terkait kontrak yang menyatakan hak dan kewajiban masing-masing.

Teori agensi merupakan salah satu dasar yang digunakan untuk memahami GCG. Jensen dan Meckling mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak yang menyatakan bahwa seorang atau lebih (*principal*) meminta kepada orang lain (*agent*) untuk melakukan jasa tertentu demi keuntungan *principal*. Teori agensi bertujuan untuk menjadikan perusahaan menjadi lebih sehat, teori agensi ini diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk meyakinkan investor bahwa mereka akan memperoleh return atas investasinya tersebut. teori agensi

menjelaskan hubungan antara manajemen dengan pemilik, manajemen dengan agen yang secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan atau profit para pemilik. Penerapan mekanisme GCG ditujukan untuk mengurangi terjadinya *agency problem*. Penerapan GCG dapat membantu mengurangi peluang bagi manajer untuk berperilaku menyimpang dan memperkaya diri sendiri.

Tujuan utama teori agensi adalah untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang melakukan hubungan kontrak yang tujuannya untuk meminimalisir biaya sebagai dampak adanya informasi yang tidak simetris dan kondisi yang mengalami ketidakpastian. Hubungan keagenan ini adalah terdapat pemisah antara kepemilikan dengan pengelolaan perusahaan.

Sutedi (2011:17) teori keagenan mengemukakan bahwa antara pihak *principal* (pemilik atau pemegang saham) dan *agent* (manajer) memiliki potensi untuk timbulnya konflik kepentingan dan memicu menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*). Biaya keagenan muncul karena konflik kepentingan antara *agent* dan *principal* dapat dikurangi dengan mekanis pengawasan yang dapat menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada dalam perusahaan yang dinamakan sebagai mekanisme GCG. Sedangkan, Brigham & Houston (2006: 26-31) menjelaskan bahwa para manajer diberi kekuasaan oleh pemilik perusahaan, yaitu pemegang saham, untuk membuat keputusan, dimana hal ini menciptakan potensi konflik kepentingan yang dikenal sebagai teori keagenan (*agency theory*).

Permasalahan keagenan yang terjadi didalam perusahaan dapat diatasi dengan diterapkannya GCG. GCG dalam hal ini berperan penting dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan dengan kepatuhan atas berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Bagi pemegang saham, GCG memberikan jaminan bahwa dana yang diinvestasikan pada perusahaan dikelola dengan baik dan akan memberikan return yang memadai. Upaya tersebut akan menimbulkan biaya keagenan yang harus dikeluarkan perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling biaya keagenan yang timbul terdiri dari:

- a. *The monitoring expenditure by the principal (monitoring cost)*, yaitu biaya pengawasan yang dikeluarkan oleh principal untuk mengawasi perilaku dari agent dalam mengelola perusahaan.

- b. *The bounding expenditure by the agent (bounding cost)*, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh agent untuk menjamin bahwa *agent* bertindak untuk kepentingan *principal*.
- c. *The residual loss*, yaitu nilai kerugian yang dialami *principal* akibat keputusan yang diambil oleh *agent* yang menyimpang dari keputusan yang dibuat oleh *principal*.

2.2.2. Good Corporate Governance

2.2.2.1. Pengertian *Good Corporate Governance*

Zingales (1997) dalam Tri gunarsih (2006) *Corporate Governance* merupakan pengelolaan (*corporate*) dari bentuk organisasi tertentu, yaitu perusahaan (*corporation*). Menurut World Bank, *corporate governance* adalah suatu standar organisasi dibidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur, dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta tanggungjawabnya kepada investor (pemilik saham dan kreditur). Dalam literatur akademis, *corporate governance* biasanya dipahami sebagai sesuatu yang berhubungan dengan masalah-masalah yang muncul dari pemisahan antara kepemilikan dan kontrol.

GCG adalah suatu pilar system ekonomi pasar, karena berhubungan dengan suatu kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Penerapan GCG sendiri pada perusahaan dapat memberikan perlindungan kepada para pemegang saham. Investor akan merasa aman apabila investasinya dapat memperoleh return sesuai dengan yang harapkannya. GCG sendiri dapat diyakini oleh para investor di perusahaan bahwa mereka akan menerima return atas investasi yang di tanamkan. Pelaksanaan GCG akan membuat para investor untuk memberikan respon secara positif terhadap nilai perusahaan yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan harga saham. GCG juga dapat memberikan kepastian terhadap investasi yang diberikan oleh para pemegang saham bahwa telah digunakan secara tepat dan efisien oleh pihak manajemen (Pratiwi, 2014: 467).

Penerapan *Corporate Governance* merupakan salah satu upaya yang cukup signifikan untuk melepaskan diri dari krisis ekonomi yang telah melanda Indonesia. Peran dan tuntutan para investor dan kreditor asing mengenai penerapan prinsip *Corporate Governance* merupakan salah satu faktor dalam

pengambilan keputusan berinvestasi dalam suatu perusahaan. Tetapi penerapan GCG bukanlah suatu hal yang mudah, untuk menerapkan GCG di Indonesia dibutuhkan suatu proses yang panjang dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, perusahaan, pihak-pihak dalam perusahaan, maupun masyarakat. Manajemen puncak perusahaan, baik direksi maupun komisaris harus mempunyai komitmen untuk menerapkan GCG dalam perusahaannya. Komitmen ini harus didukung oleh semua pihak yang berkaitan dengan perusahaan, karena pada dasarnya tuntutan untuk melaksanakan komitmen penerapan GCG akan berpengaruh pada keberlangsungan perusahaan tersebut, artinya apabila GCG diterapkan secara baik oleh perusahaan, maka dengan sendirinya perusahaan akan berjalan secara efisien dan akan meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan (Ulum, 2017:125).

Menurut Effendi (2014:114), perusahaan yang tidak mengimplementasikan Good Corporate Governance pada akhirnya bisa ditinggalkan oleh investor, kurang dipercayai masyarakat, serta dapat memberikan sanksi berdasarkan hasil penilaian apabila perusahaan tersebut telah terbukti melanggar hukum. Perusahaan seperti ini bisa kehilangan peluang (*opportunity*) untuk melanjutkan kegiatan usahanya dengan lancar (*going concern*). Namun sebaliknya, apabila perusahaan yang telah mengimplementasikan Good Corporate Governance dapat menciptakan suatu nilai (*value creation*) untuk masyarakat, pemasok, distributor, pemerintah dan ternyata lebih banyak diminati oleh para investor sehingga dapat berdampak langsung terhadap kelangsungan usaha perusahaan.

Dengan adanya sistem *good corporate governance* dapat diharapkan para pemegang saham dan investor menjadi yakin akan dapat memperoleh return atas investasinya, karena *good corporate governance* telah memberikan perlindungan efektif bagi para pemegang saham dan investor. *good corporate governance* juga membantu dalam menciptakan suatu lingkungan yang kondusif demi terciptanya pertumbuhan yang sangat efisien di kantor korporat. Dalam hal ini *good corporate governance* didefinisikan sebagai suatu susunan aturan yang bisa menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan dan *stakeholder internal* serta eksternal lain yang sesuai dengan hak dan tanggungjawabnya (Addiyah, 2014:4).

GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha.

Penerapan GCG akan tercapai apabila terdapat hubungan antara unsur yang terkait dengan perusahaan baik unsur internal maupun eksternal. Anggota dewan komisaris diwajibkan untuk memenuhi berbagai persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan dan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata sesuai kepentingan perusahaan (Arief Effendi, 2010).

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan latar belakang kebutuhan atas GCG, jika dari latar belakang praktis, dapat dilihat dari pengalaman Amerika Serikat yang wajib melakukan restrukturisasi corporate governance karena akibat dari adanya market crash pada tahun 1929. Dari latar belakang akademis, kebutuhan GCG yang timbul serta berkaitan dengan principal-agency theory. Implementasi dari GCG dapat diharapkan bermanfaat dalam menambah dan memaksimalkan nilai perusahaan. GCG diharapkan mampu memperoleh keseimbangan antara berbagai kepentingan yang dapat memberikan keuntungan bagi suatu perusahaan secara menyeluruh (Retno dan Priantinah, 2012: 87).

Sedarmayanti (2012) *corporate governance* adalah sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terutama dalam arti sempit, hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. *Corporate governance* dimaksudkan untuk mengatur hubungan ini dengan mencegah terjadinya kesalahan signifikansi dalam strategi korporasi dan untuk memastikan kesalahan yang terjadi dapat segera diperbaiki. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 88 /PMK.06/2015 mendefinisikan Tata

Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagai suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan perseroan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran, untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan usaha yang memperhatikan kepentingan setiap pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan usaha, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang berlaku umum.

2.2.2.2. Prinsip- prinsip *Good Corporate Governance*

Corporate governance memiliki pengaruh yang tinggi terhadap kinerja perusahaan, sehingga perusahaan harus mengetahui prinsip dari corporate governance dan bagaimana mengembangkan strategi serta implementasinya. (Crowther dan Sheifi 2011). Terdapat empat prinsip pada corporate governance, yaitu:

1) *Fairness* (keadilan).

Menjamin adanya perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini menekankan bahwa semua pihak, yaitu baik pemegang saham minoritas maupun asing harus diberlakukan sama.

2) *Transparency* (transparansi).

Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, akurat dan tepat pada waktunya mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan para pemegang kepentingan (*stakeholders*).

3) *Accountability* (akuntabilitas).

Menjelaskan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Prinsip ini menegaskan pertanggungjawaban manajemen terhadap perusahaan dan para pemegang saham.

4) *Responsibility* (pertanggungjawaban).

Memastikan kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Dalam hal ini perusahaan memiliki tanggungjawab sosial terhadap

masyarakat atau *stakeholders* dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan menjunjung etika bisnis serta tetap menjaga lingkungan bisnis yang sehat.

2.2.2.3. Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance*

Tujuan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (KNKG, 2006) adalah dalam rangka:

- 1) Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan ,elalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, Akuntabilitas, responsibilotas independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.
- 2) Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu dewan komisaris, direksi dan rapat umum pemegang saham.
- 3) Mendorong pemegan saham, Anggota dewan komisaris dan anggota direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- 4) Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggungjawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama disekitar perusahaan.
- 5) Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memerhatikan pemanku kepentingan lainnya.
- 6) Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional berkesinambungan.

2.2.2.4. Mekanisme *Corporate Governance*

Mekanisme merupakan cara kerja sesuatu secara tersistem untuk memenuhi persyaratan tertentu. Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap keputusan. Mekanisme dalam pengawasan *corporate governance* dibagi menjadi dua kelompok yaitu internal dan eksternal (Nugrahanti dan Novia, 2017).

Internal mechanisms adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham

(RUPS), komposisi dewan direksi, komposisi dewan komisaris dan pertemuan dengan *board of director*. Sedangkan *external mechanisms* adalah cara mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal, seperti pengendalian oleh perusahaan dan pengendalian pasar.

Mekanisme *corporate governance* dalam penelitian ini meliputi kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan komite audit.

1) Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris bertugas untuk mengawasi jalannya perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Selain itu dewan komisaris memiliki kewajiban untuk mengawasi kinerja dewan direksi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dari dewan direksi. Menurut Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Tugas utama dewan komisaris adalah melakukan kontroling dan memberi masukan atau nasihat kepada direksi, semakin banyak dewan komisaris pada perusahaan maka semakin baik pula kinerja keuangan perusahaan tersebut. Setiap anggota dewan komisaris bertanggung jawab secara personal terhadap kerugian yang dialami perusahaan apabila mereka melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya. Pemegang saham pun dapat menggugat dewan komisaris melalui jalur pengadilan jika kerugian yang dialami perusahaan akibat kelalaian atau kesalahan dari dewan komisaris. Bila perusahaan dihadapkan dengan kepailitan akibat kesalahan dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap jajaran direksi, maka setiap anggota dewan komisaris serta direksi secara keseluruhan wajib membantu pendanaan finansial. Hal ini biasanya terjadi jika kekayaan sebuah perusahaan tidak cukup membayar seluruh kewajiban akibat kepailitan yang dialami. Tanggung jawab penuh itu berlaku bagi orang yang merupakan jajaran dewan komisaris dalam rentang waktu 5 tahun sebelum kepailitan perusahaan terjadi. Dewan komisaris juga mempunyai kewajiban membuat catatan laporan rapat dewan komisaris dan menyimpan salinan laporan

tersebut. Selain itu, dewan komisaris berkewajiban juga melaporkan tugas pengawasan yang telah dilakukannya dalam tiap tahun kepada RUPS.

Komisaris independen memiliki tugas yang sama seperti dewan komisaris, dan memiliki perbedaan dalam tugas penyalarsan kepentingan pemegang saham mayoritas dan minoritas dalam perusahaan. Selain itu, perbedaan komisaris independen dengan dewan komisaris adalah komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan perusahaan. Dengan kebenaran dan kelayakan informasi keuangan dan informasi perusahaan lainnya maka dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Komisaris independen melakukan peran pengendali dalam mengevaluasi keputusan manajer melalui keterampilan mereka, keahlian pengetahuan dan objektivitas untuk mengurangi biaya agensi dan mengutamakan kepentingan pemegang saham. Komisaris independen diharapkan untuk bertanggung jawab untuk membawa penilaian independen untuk menanggung pada masalah strategi, kinerja dan sumber daya termasuk janji kunci dan standar perilaku (Pandya, 2011: 4-21).

Komisaris Independen bisa disebut dengan lembaga pengawasan yang semata-mata bekerja untuk kepentingan perusahaan secara umum, komisaris independen tidak lagi bertindak atas nama pemegang saham, tetapi harus mempertahankan kepentingan perusahaan terhadap semua yang termasuk di dalam perusahaan, dan menjaga berdirinya prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam perusahaan (Firmansyahrez, Dudipratomo, & Siskayudowati, 2016 :1552).

2) Dewan Direksi

Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif dari manajemen oleh dewan komisaris, dan akuntabilitas dewan komisaris untuk perusahaan dan para pemegang saham (OECD, 2004). Pengukuran dewan komisaris yang

digunakan dalam penelitian ini menggunakan jumlah dewan komisaris yang ada dalam perusahaan (El-Chaarani, 2014 : 22-34).

Dewan direksi mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Dengan adanya pemisahan peran dengan dewan komisaris, dewan direksi memiliki kekuasaan yang besar dalam mengelola sumber daya yang ada dalam perusahaan. Dewan direksi mempunyai tugas untuk memastikan kebijakan - kebijakan dan strategi sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek (Sukandar & Rahardja, 2014 :1-7).

Dewan direksi yaitu dewan yang dipilih oleh pemegang saham, bertugas mengawasi pekerjaan yang dilakukan manajemen dalam mengelola perusahaan, dengan tujuan kepentingan para pemegang saham. Ukuran dewan direksi dalam perusahaan sangatlah penting untuk pencapaian komunikasi yang efektif antara anggota dewan. Komunikasi yang baik akan meningkatkan pengawasan terhadap manajemen dalam perusahaan sehingga dapat mengurangi perilaku oportunistik manajemen.

3) Komite Audit

Berdasarkan Keputusan Direksi BEJ No. Kep 315/BEJ/06/2000 menyatakan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris, yang bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan dan penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan. Sesuai dengan ketentuan yang ada di Indonesia, komisaris merupakan ketua komite audit. Komite audit merupakan perpanjangan tangan dari dewan komisaris dalam melakukan kontrol dan monitoring terhadap dewan direksi (Lestari, 2013).

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite audit mempunyai peran yang penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan, menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *good corporate governance*. Komite audit diketuai oleh

Komisaris Independen dan memiliki anggota paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar perusahaan publik. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Independen, sebagaimana diatur dalam Anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Komite audit bertugas menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya Good Corporate Governance (GCG). Dengan berjalannya fungsi komite audit secara efektif, maka kontrol terhadap perusahaan akan lebih baik sehingga konflik atau masalah keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri dapat diminimalisasi.

Komite Audit adalah suatu komite yang berpandangan tentang masalah akuntansi, laporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal serta auditor independen (Riniati, 2015). Anggota komite audit terdiri dari 3 sampai dengan 5 bahkan terkadang sampai 7 orang yang bukan merupakan bagian manajemen perusahaan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa komite audit merupakan suatu kelompok yang sifatnya independen dan diangkat secara khusus serta memiliki pandangan yang terkait dengan sistem pengawasan internal perusahaan serta bertugas membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate governance di perusahaan.

2.3. Kinerja Keuangan

2.3.1. Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya atas kecakapan, usaha dan kesempatan. Berdasarkan paparan diatas kinerja adalah suatu hasil yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu menurut standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Hasibuan & Moedjiono 2002:160). Kinerja keuangan menurut IAI (2007) adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya. Kinerja keuangan menurut Rudianto (2013) adalah hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu. Kinerja keuangan sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengetahui dan mengevaluasi sampai dimana tingkat keberhasilan perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan.

Kinerja keuangan merupakan salah satu faktor yang menunjukkan efektivitas dan efisiensi suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Efektivitas apabila manajemen memiliki kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau suatu alat yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efisiensi diartikan sebagai ratio (perbandingan) antara masukan dan keluaran yaitu dengan masukan tertentu memperoleh keluaran yang optimal.

Kinerja keuangan perusahaan dapat diartikan sebagai pengukuran prestasi yang telah dicapai oleh perusahaan yang menunjukkan kondisi yang baik untuk jangka waktu tertentu. Pengukuran prestasi bertujuan untuk mendapatkan informasi yang berguna terkait dengan aliran dana, penggunaan dana, efisiensi, dan efektifitas. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui laporan keuangan perusahaan. Kinerja keuangan telah me-nerima perhatian yang signifikan dari para peneliti di berbagai bidang bisnis dan manajemen strategis. Hal ini juga menjadi perhatian utama dari para praktisi bisnis di semua jenis organisasi karena kinerja keuangan memiliki implikasi bagi kesehatan dan kelangsungan hidup suatu organisasi.

Kinerja perusahaan yang tinggi mencerminkan efektifitas manajemen dan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya perusahaan dan pada umumnya memberikan kontribusi untuk perekonomian Negara (Almajali et al, 2012).

Kinerja keuangan perusahaan merupakan salah satu faktor yang dilihat oleh calon investor untuk menentukan investasi saham. Bagi sebuah perusahaan, menjaga dan meningkatkan kinerja keuangan adalah salah satu keharusan agar saham tersebut tetap eksis dan tetap diminati oleh investor. Dalam hubungannya dengan kinerja, laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan merupakan cerminan dari kinerja keuangan perusahaan. Laporan keuangan adalah akhir proses dari akuntansi dengan tujuan untuk memberi informasi keuangan yang dapat menjelaskan kondisi perusahaan dalam satu periode tertentu. Pengukuran kinerja keuangan merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh investor untuk menilai suatu perusahaan dari harga pasar saham tersebut di Bursa Efek Indonesia. Semakin baik kinerja perusahaan maka akan semakin tinggi return yang akan diperoleh oleh investor. Umumnya investor akan mencari perusahaan yang mempunyai kinerja terbaik dan menanamkan modalnya kepada perusahaan tersebut.

Suatu analisis yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar unsur dari kinerja keuangan perusahaan yaitu, unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran kinerja perusahaan disajikan pada laporan keuangan yang disebut sebagai laporan laba rugi, penghasilan bersih, seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar bagi ukuran lainnya (Finolitha Yulieth Lahonda, Ilat, & Tirayoh, 2014 :627).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kinerja dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat dicapai, prestasi yang diperlihatkan dan kemampuan kerja, berkinerja artinya berkemampuan dengan menggunakan tenaga. Jadi kinerja keuangan adalah kemampuan kerja manajemen keuangan dalam mencapai prestasi kinerjanya.

Kinerja keuangan perusahaan merupakan penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba.

Kinerja keuangan merupakan salah satu faktor yang menunjukkan efektifitas dan efisien suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Tujuan perusahaan akan sulit tercapai bila perusahaan tersebut tidak bekerja secara efisien, sehingga perusahaan tidak mampu baik langsung maupun tidak langsung bersaing dengan perusahaan sejenis Wijaya (2017).

Kinerja keuangan merupakan suatu faktor yang dapat menunjukkan efektifitas dan efisien suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Efektifitas apabila manajemen mempunyai kemampuan dalam memilih tujuan yang tepat maupun alat yang tepat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Sedangkan efisiensi dapat diartikan sebagai ratio (perbandingan) antara masukan dengan keluaran. Kinerja keuangan perusahaan akan dinilai melalui berbagai macam indikator ataupun variabel untuk mengukur keberhasilan suatu perusahaan, pada umumnya berfokus terhadap informasi kinerja yang berasal dari laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan. Asumsi dasar di balik riset *governance* dalam akuntansi yaitu kontribusi peningkatan *governance* terhadap *return on investment*, yang pada gilirannya dapat membantu efektifitas pelaksanaan pasar modal dan efisiensi arus dana maupun tenaga kerja karena adanya suatu peluang dalam investasi (Widhianingrum, 2012:97).

Perusahaan sebagai salah satu bentuk organisasi pasti memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai, tidak hanya untuk mencari laba namun juga berusaha untuk memenuhi kepentingan para anggotanya. Dalam mencapai tujuan tersebut, tidak sedikit pihak manajemen yang menerapkan praktik yang tidak sehat dalam pengambilan keputusan baik secara operasional atau dalam metode akuntansi yang berpengaruh pada peningkatan kinerja suatu perusahaan. Konflik yang diprakarsai oleh persinggungan kepentingan antara pemilik dengan manajemen dapat berdampak terhadap buruknya citra perusahaan dan kinerja yang telah dihasilkan perusahaan tersebut. Untuk dapat menghindari kemungkinan terjadinya pemicu menurunnya suatu kinerja perusahaan, diperlukan penerapan suatu sistem yang baik, pengawasan yang efektif, dan pengambilan keputusan yang tepat dalam meningkatkan kualitas kerja suatu perusahaan. Corporate Governance merupakan salah satu cara untuk mengendalikan tindakan oportunistik yang akan dilakukan oleh manajemen (Theacini, 2014:733).

2.3.2. Pengukuran Kinerja keuangan Perusahaan

Analisis Rasio Keuangan adalah suatu cara yang membuat perbandingan data keuangan perusahaan menjadi lebih berarti. Rasio keuangan menjadi dasar untuk menjawab beberapa pertanyaan penting mengenai kesehatan keuangan dari perusahaan (Samryn:2011).

Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan diatas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap review data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu.

Kinerja keuangan yang akan diukur dalam penelitian ini meliputi Return On Asset (ROA).

a) *Return on asset* (ROA)

ROA merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA merupakan salah satu bentuk rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan atas keseluruhan dana yang ditanamkan dalam kegiatan operasi perusahaan yang bertujuan untuk menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan.

ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan keseluruhan total aset yang dimiliki (Attar, Islahuddin, & Shabri, 2014:10-20). ROA mengukur seberapa efektif perusahaan dapat mengubah pendapatan dari pengembalian investasinya menjadi asset. Semakin tinggi ROA perusahaan semakin baik. Beberapa perusahaan menekankan *net margin* yang tinggi untuk meningkatkan ROA mereka.

2.3.3. Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja

Mardiasmo (2005:122) tujuan pengukuran kinerja perusahaan adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (*top down and bottom up*).
- 2) Untuk mengukur kinerja *finansial* dan *non finansial* secara berimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi.
- 3) Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai *goal congruence*.
- 4) Sebagai alat untuk mencapaikepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Selanjutnya Mardiasmo (2005:122) membagi manfaat pengukuran dan penilaian kinerja perusahaan adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
- 2) Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan
- 3) Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkan dengan target kinerja serta melakukan tindak korektif untuk memperbaiki kinerja.
- 4) Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
- 5) Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
- 6) Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
- 7) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
- 8) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif

2.4. Hubungan antar Variabel Penelitian

2.4.1. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan.

Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan perusahaan. Dengan kebenaran dan kelayakan informasi keuangan dan informasi perusahaan lainnya maka dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Komisaris independen melakukan peran pengendali dalam mengevaluasi keputusan manajer melalui keterampilan mereka, keahlian pengetahuan dan objektivitas untuk mengurangi biaya agensi dan mengutamakan kepentingan pemegang saham. Komisaris independen diharapkan untuk bertanggung jawab untuk membawa penilaian independen untuk menanggung pada masalah strategi, kinerja dan sumber daya termasuk janji kunci dan standar perilaku (Pandya, 2011) dalam Tertius & Christiawan (2015:47). Adanya komisaris independen diharapkan dapat mengurangi konsumsi manajer dan semakin banyaknya komisaris independen dapat memonitor perusahaan dengan lebih dekat, dan melakukan tindakan terkait dengan tata kelola perusahaan yaitu mengurangi manajemen puncak yang memiliki kinerja buruk. Dengan pemecatan manajemen puncak yang memiliki kinerja buruk tersebut, pasar merespon positif sehingga ROA meningkat.

Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance*. Semakin besar jumlah komisaris independen maka keputusan yang dibuat dewan komisaris lebih mengutamakan kepada kepentingan perusahaan, sehingga berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (Rizky Arifani 2016). Hasil penelitian sebelumnya menemukan bahwa keberadaan komisaris idependen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan (Prantama et al. 2015).

Dewan komisaris yang lebih besar meningkatkan akses dalam berbagai sumber daya terhadap lingkungan eksternal perusahaan dan berdampak positif pada kinerja perusahaan. dengan jumlah dewan komisaris yang 7 semakin besar maka mekanisme monitoring manajemen perusahaan akan semakin membaik. Dengan besarnya jumlah dewan komisaris dalam perusahaan meningkatkan akses ke berbagai sumber daya terhadap lingkungan eksternal dan berdampak positif pada kinerja perusahaan. begitu pula dengan dewan komisaris besar yang lebih beragam, dapat memberikan perpaduan keahlian, pengetahuan dan keterampilan.

Jumlah dewan yang lebih besar menguntungkan perusahaan dari sudut pandang ketergantungan sumber daya (Agustina et al. 2015 ; 223).

komisaris independen dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan direksi serta memberikan nasihat kepada direksi (Andayani, 2010) .

Dewan komisaris independen bisa untuk meningkatkan fungsi pengawasan pada perusahaan. Dewan komisaris independen merupakan komisaris yang tidak ada hubungan bisnis dengan direksi maupun pemegang saham. Adanya dewan komisaris independen dalam perusahaan dapat membantu dan mengurangi masalah keagenan dan mencegah terjadinya perilaku oportunistik. Dewan komisaris independen dapat membantu perusahaan untuk menghindari ancaman - ancaman dari luar atau internal sehingga dapat tetap bisa mempertahankan sumber daya perusahaan agar memperoleh keuntungan yang tinggi, yang nantinya dapat meningkatkan kinerja keuangan pada perusahaan (Candradewi & Sedana, 2016 : 3163).

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Brown & Caylor (2004) dan Elchaarani (2014) ditemukan hubungan yang positif dan kuat antara independent board dengan kinerja perusahaan. Semakin besar jumlah komisaris independen dalam perusahaan menyebabkan manajemen perusahaan tidak dapat melakukan kecurangan sehingga kinerja perusahaan bagus dan sehat. Penelitian yang dilakukan oleh El-chaarani (2014) ditemukan bahwa *proportion of independent director* secara signifikan mempengaruhi kinerja perusahaan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Pratama & Suputra (2015) hasil penelitian menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh pada ROA perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak komisaris independen dalam perusahaan dapat menjalankan sistem pengawasan yang lebih baik pada manajemen dalam melakukan tugasnya, sehingga dapat membantu meningkatkan kinerja perusahaan. Maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

2.4.2. Pengaruh Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan

Dewan direksi merupakan seseorang yang ditunjuk dan diberi kewenangan dalam memimpin perusahaan. Dewan direksi mempunyai kewenangan dalam menentukan kebijakan atau strategi yang akan dilakukan dalam suatu perusahaan dalam jangka panjang atau jangka pendek. Fungsi utama Dewan direksi mencakup kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi serta tanggung jawab social (KNKG, 2006).

Dewan direksi adalah dewan yang bertugas mengawasi perusahaan dan memiliki peranan yang sangat vital dalam suatu perusahaan. Dewan direksi diukur dengan menghitung jumlah anggota dewan direksi pada suatu perusahaan (Syafitri, Nuzula, & Nurlaily, 2018:118).

Dewan direksi dapat mempengaruhi efektif tidaknya aktivitas monitoring. Selain itu juga dapat mempengaruhi hubungan kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan. Semakin besar Komposisi dewan direksi akan berdampak positif terhadap kinerja perusahaan dan nilai perusahaan (Alifia Faizun Nahari 2016 ; 1-8).

H₂ : Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

2.4.3. Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Perusahaan

Komite audit merupakan suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang tugasnya adalah membantu dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas laporan keuangan serta implementasi dari GCG. Karena tugas komite audit adalah untuk membantu dewan komisaris maka dengan semakin banyaknya anggota komite audit, maka pengawasan yang dilakukan akan semakin baik dan diharapkan dapat meminimalisir upaya manajemen untuk memanipulasi data-data yang berkaitan dengan keuangan dan prosedur akuntansi, sehingga kinerja keuangan perusahaan pun akan semakin meningkat. Hal ini didukung oleh Siallagan dan Machfoedz dalam Ekowati Dyah Lestari (2011) yang menyatakan bahwa keberadaan komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Komite audit berfungsi sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah

pengendalian. hasil penelitian dari Dewi dan Widagdo (2012) juga menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.

Komite audit bertugas menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *Good Corporate Governance* (GCG). Dengan berjalannya fungsi komite audit secara efektif, maka kontrol terhadap perusahaan akan lebih baik sehingga konflik atau masalah keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri dapat diminimalisasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Fidiana (2017) mengatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

H₃ : Komite Audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

2.5. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari (1) Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap kinerja keuangan, (2) Pengaruh Dewan Direksi terhadap kinerja keuangan dan (3) pengaruh Komite Audit terhadap kinerja keuangan. Ketiga pengaruh hipotesis ini dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

H₁ : Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap kinerja keuangan perusahaan.

H₂ : Pengaruh Dewan Direksi positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

H₃ : pengaruh Komite Audit Positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.6. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah adanya indikator GCG yaitu dewan direksi, dewan komisaris dan komite audit yang mempunyai pengaruh terhadap baik atau tidaknya kinerja keuangan perusahaan. Kerangka pemikiran penelitian ini yaitu:

